

# RENJA PERUBAHAN 2024



## RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan karunia-Nya lah Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, selanjutnya Renja Perubahan SKPD menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja Perubahan ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Demikian Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang Tahun 2024 ini disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkompeten.

Semarang, 7 Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak  
Kota Semarang



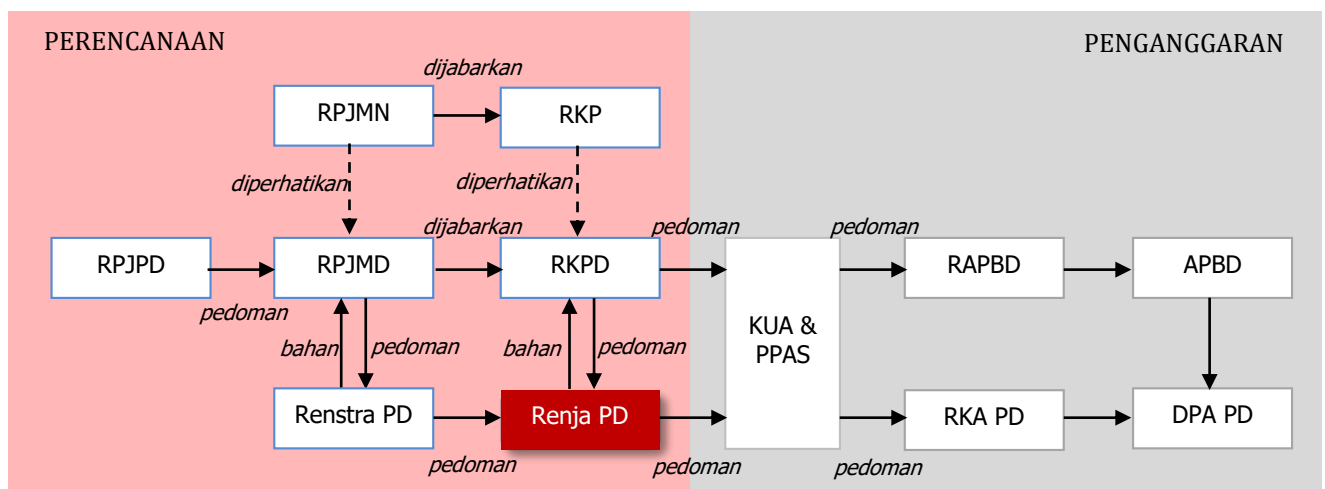
**dr. Noegroho Edy Rijanto, M.Kes**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh perkembangan isu dan permasalahan aktual yang muncul di tahun 2024. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dan capaian hasil sampai dengan triwulan 2 tahun 2024 juga menjadi dasar untuk penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024. Implikasi yang ditimbulkan dari perubahan tersebut adalah diperlukannya penyesuaian terhadap target pendapatan serta pagu indikatif. Di samping itu, penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan triwulan II tahun 2024 juga perlu dilakukan. Perubahan dokumen RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan

dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);

- v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;

- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG**

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2024.

#### **BAB V PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG TAHUN 2024**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG**

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026.

##### **a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang**

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2. 1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024**  
**Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%	100%	100%	89,28%	89,28	189,28%	189,28
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	16 Dokumen	59,26	43 Dokumen	159,26
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	50	7 Dokumen	175
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	4 Dokumen	200
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	4 Laporan	66,67	10 Laporan	166,67
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7 Dokumen	58,33	19 Dokumen	158,33
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	52 Orang/Bulan	104	102 Orang/Bulan	248,78
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	200
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	-	2 Dokumen	100
2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	6 Laporan	42,85	20 Dokumen	142,85
2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur	100%	100%	100%	75%	75	175%	175
2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 Dokumen	400
2.08.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang	509 Orang	480 Orang	360 Orang	75	869 Orang	217,25
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	2 Paket	200
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2 Paket	1 Paket	50	2 Paket	200
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	2 Paket	2 Paket	100	5 Paket	166,67
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100	8 Paket	200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100	6 Paket	200
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5 Laporan	41,67	17 Laporan	141,67
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	23 Laporan	20 Laporan	8 Laporan	40	31 Laporan	155
2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	200	12 Dokumen	240
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	90%	90	190%	190
2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	-	10 Unit	-	-	-	-
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5 Unit	5 Unit	13 Unit	260	18 Unit	900
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4 Unit	5 Unit	12 Unit	240	16 Unit	1.600
2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	7 Unit	1 Unit	5 Unit	500	12 Unit	240
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50	150%	150

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	18 Laporan	50	54 Laporan	150
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	18 Laporan	150
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset dinas	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	2 Unit	200
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	30 Unit	30 Unit	17 Unit	56,67	47 Unit	174,07
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	4 Unit	40	14 Unit	140
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	4 Unit	200
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	2 Unit	1 Unit	50	11 Unit	110
<b>2.08.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>35,29%</b>	<b>35,29</b>	<b>135,29%</b>	<b>135,29</b>

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	93 Program	93 Program	96 Program	100 Program	104,17	193	207,53
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3 Dokumen	150
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	200
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	100	34 Perangkat Daerah	113,33
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	46 Perangkat Daerah	-	-	32 Perangkat Daerah	106,67
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi perempuan	100%	100%	100%	50%	150	150%	150
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang	2 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	-	-	2 Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		<i>Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>							
2.08.02.2.02.0002	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>	<i>Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	25 Organisasi	29 Organisasi	25 Organisasi	25 Organisasi	100	54 Organisasi	216
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	30 Lembaga	31 Lembaga	31 Lembaga	31 Lembaga	100	62 Lembaga	206,67
2.08.02.2.03.0001	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan</i>	25 Lembaga	29 Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	100	54 Lembaga	216
2.08.02.2.03.0002	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>	50 Orang	200 Orang	200 Orang	40 Orang	200	240 Orang	480
2.08.02.2.03.0003	<i>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	3 Dokumen	42,86	4 Dokumen	400
<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</b>	<b>14,00 Poin</b>	<b>25,08 Poin</b>	<b>12,84 Poin</b>	<b>10,86 Poin</b>	<b>84,58</b>	<b>35,94</b>	<b>256,71</b>
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	50%	6 Kegiatan	150%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	9 Dokumen	12 Dokumen	5 Dokumen	42%	14 Dokumen	700%
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	60 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	42%	60 Perangkat Daerah	200%
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	100%	10 Lembaga	200%
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	227 Orang	100 Orang	116 Orang	116%	343 Orang	343%
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota	-	-	80 Layanan				
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan	26 Lembaga	26 Lembaga	26 Lembaga	8 Lembaga	31%	34 Lembaga	131%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	13 Dokumen	108%
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1.630 Orang	1.770 Orang	297 Orang	160 Orang	54%	1930 Orang	118%
2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	3 Orang	100 Orang	5 Orang	1 Orang	20%	101 Orang	3367%
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	24 Dokumen	19 Dokumen	6 Dokumen	32%	30 Dokumen	750%
<b>2.08.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50</b>	<b>150%</b>	<b>150</b>
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	100%	20 Perangkat Daerah	125%
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	12 Dokumen	30 Dokumen	15 Dokumen	50%	27 Dokumen	2700%
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	13 Dokumen	1300%
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	8 Kegiatan	47%	25 Kegiatan	147%
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	3 Lembaga	-	-	1 Lembaga	100%
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	354 Orang	16 Orang	16 Orang	100%	370 Orang	247%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	13 Dokumen	650%
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis kesetaraan gender	100%	100%	100%	-	-	100%	100%
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan	2 Layanan	1 Layanan	-	-	2 Layanan	100%
<b>2.08.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>33,33%</b>	<b>33,33</b>	<b>133,33%</b>	<b>133,33</b>
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%	3 Kegiatan	150%
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	3 Dokumen	150%
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33%	3 Dokumen	150%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
<b>2.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Cakupan Pemenuhan Hak Anak</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>28,57%</b>	<b>28,57</b>	<b>128,57%</b>	<b>128,57</b>
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	8 Jejaring	8 Jejaring	9 Jejaring	9 Jejaring	100%	17 Jejaring	213%
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	7 Organisasi	7 Organisasi	3 Organisasi	-	-	7 Organisasi	100%
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	17%	3 Dokumen	150%
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	7 Lembaga	7 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	16 Lembaga	229%
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	650 Orang	50 Orang	20 Orang	40%	670 Orang	168%
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	10 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33%	11 Dokumen	275%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	17%	5 Dokumen	125%
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	17%	7 Dokumen	117%
<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase anak korban kekerasan yang ditangani</b>	<b>0,012%</b>	<b>0,027%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>	<b>100</b>	<b>0,037%</b>	<b>308,33</b>
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak	4 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	4 Kegiatan	100%
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan Pendamping Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan / program / kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan pencegahan KTA	-	-	100 orang	-	-	-	-
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	-	-	7 Lembaga	100%
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi pelaksanaan layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	-	-	60 Orang	51 Orang	85%	51 Orang	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	100%	100%	40%	40%	140%	140%
2.08.07.2.03.0006	<i>Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ kota</i>	<i>Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK</i>	-	-	60 orang	-	-	-	-
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>200%</b>	<b>200</b>
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	100 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	100%	354 Kelurahan	354%
2.13.04.2.01.0011	<i>Fasilitasi Penyusunan Profil Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>200%</i>
2.13.04.2.01.0018	<i>Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>150%</i>
<b>2.13.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM</b>	<b>Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>48,48%</b>	<b>48,48</b>	<b>148,48%</b>	<b>148,48</b>
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	100%	354 Kelurahan	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	3 Dokumen	150%
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	2 Lembaga	200%
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	-	-	2 Laporan	100%
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50%	5 Laporan	250%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2024

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 beberapa sub kegiatan sudah mencapai tingkat realisasi 100% tetapi juga ada beberapa sub kegiatan yang belum tercapai karena sedang proses pelaksanaan di triwulan III dan triwulan IV.

Selain itu juga ada beberapa sub kegiatan yang mengalami hold belanja (efisiensi) dari kebijakan TAPD Kota Semarang.

**b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan**

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2. 2**  
**Realisasi Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Triwulan II Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG</b>		<b>26.390.239.709</b>	<b>10.411.084.355</b>	<b>39,45 %</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>14.236.424.080</b>	<b>6.818.889.960</b>	<b>47,90%</b>
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.202.400	5.968.100	9,01%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.696.000	537.600	1,70%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.586.000		0,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.036.000		0,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.379.200	1.359.900	98,60%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.012.000		0,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.596.800	2.576.600	71,64%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.896.400	1.494.000	6,53%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.274.896.345	4.974.295.137	48,41%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.028.308.000	4.888.285.137	48,74%
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	242.578.745	86.010.000	35,46%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.124.000		0,00%
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	750.000		0,00%

12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.573.600		0,00%
13	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	562.000		0,00%
<b>C</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>315.131.866</b>	<b>256.529.450</b>	<b>81,40%</b>
14	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	180.877.416	157.025.000	86,81%
15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	134.254.450	99.504.450	74,12%
<b>D</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.132.653.027</b>	<b>442.439.158</b>	<b>39,06%</b>
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.355.300	1.494.000	27,90%
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.384.560	7.750.000	14,79%
18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.997.620	10.316.488	34,39%
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.466.452	8.034.000	12,46%
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.375.425	7.055.520	27,80%
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.000.000	6.565.000	13,68%
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	522.468.040	125.424.150	24,01%
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	384.605.630	275.800.000	71,71%
<b>E</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.059.191.840</b>	<b>574.905.000</b>	<b>54,28%</b>
24	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	418.460.000	-	0,00%
25	Pengadaan Mebel	398.683.990	370.463.000	92,92%
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	184.129.330	179.042.000	97,24%
27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.918.520	25.400.000	43,85%
<b>F</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>584.758.230</b>	<b>212.324.325</b>	<b>36,31%</b>
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.033.090	55.200.527	30,66%
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	404.725.140	157.123.798	38,82%
<b>G</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>803.590.372</b>	<b>352.428.790</b>	<b>43,86%</b>
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.910.050	20.725.526	51,93%
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	401.088.510	103.398.798	25,78%
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.390.566	9.017.000	20,78%
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	299.562.705	214.121.066	71,48%
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.638.541	5.166.400	26,31%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>1.528.449.604</b>	<b>548.247.750</b>	<b>35,87%</b>
<b>H</b>	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>216.903.968</b>	<b>45.723.785</b>	<b>21,08%</b>

35	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	33.766.450	8.502.500	25,18%
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	54.244.530	3.662.000	6,75%
37	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	70.029.658	32.150.785	45,91%
38	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	58.863.330	1.408.500	2,39%
I	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	464.347.212	163.755.200	35,27%
39	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	83.278.642	1.450.500	1,74%
40	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	381.068.570	162.304.700	42,59%
J	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	847.198.424	338.768.765	39,99%
41	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	527.198.578	272.030.630	51,60%
42	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	160.539.028	23.056.330	14,36%
43	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	159.460.818	43.681.805	27,39%
III	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>3.094.192.378</b>	<b>894.231.970</b>	<b>28,90%</b>
K	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	757.249.882	238.815.200	31,54%
44	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	518.504.782	180.121.300	34,74%
45	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	238.745.100	58.693.900	24,58%
L	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.499.368.184	502.087.770	33,49%
46	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.360.848.184	465.352.770	34,20%
47	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	138.520.000	36.735.000	26,52%
M	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	837.574.312	153.329.000	18,31%
48	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	313.882.570	48.472.000	15,44%
49	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	176.975.903	47.235.000	26,69%
50	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	176.828.359	9.283.000	5,25%
51	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	169.887.480	48.339.000	28,45%

<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>2.581.500.000</b>	<b>944.325.680</b>	<b>36,58%</b>
N	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.082.612.120	743.790.180	35,71%
52	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	355.000.000	160.898.500	45,32%
53	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	101.500.000	42.995.200	42,36%
54	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.626.112.120	539.896.480	33,20%
O	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	470.551.180	198.346.500	42,15%
55	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73.217.800	9.395.500	12,83%
56	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	373.887.880	188.620.000	50,45%
57	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.445.500	331.000	1,41%
P	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.336.700	2.189.000	7,72%
58	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.336.700	2.189.000	7,72%
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>335.219.990</b>	<b>78.090.000</b>	<b>23,30%</b>
Q	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	335.219.990	78.090.000	23,30%
59	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	99.118.300	34.100.000	34,40%
60	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	236.101.690	43.990.000	18,63%
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>1.832.108.926</b>	<b>296.930.094</b>	<b>16,21%</b>
R	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	449.802.500	21.455.000	4,77%
61	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	65.000.000	7.150.000	11,00%
62	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	384.802.500	14.305.000	3,72%
S	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1.382.306.426	275.475.094	19,93%
63	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	770.790.426	202.055.094	26,21%
64	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	24.650.000	14,50%

65	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	221.516.000	27.270.000	12,31%
66	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	220.000.000	21.500.000	9,77%
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>173.359.216</b>	<b>8.779.500</b>	<b>5,06%</b>
T	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	54.250.000	-	0,00%
67	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	54.250.000	-	0,00%
U	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96.960.000	8.779.500	9,05%
68	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	96.960.000	8.779.500	9,05%
V	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.149.216	-	0,00%
69	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota	22.149.216	-	0,00%
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>545.129.154</b>	<b>64.600.000</b>	<b>11,85%</b>
W	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	545.129.154	64.600.000	11,85%
70	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	27.463.700	25.100.000	91,39%
71	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	517.665.454	39.500.000	7,63%
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>2.063.856.361</b>	<b>756.989.401</b>	<b>36,68%</b>
X	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.063.856.361	756.989.401	36,68%
72	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	388.427.510	45.573.500	11,73%
73	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100.667.580	22.607.930	22,46%
74	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	124.068.520	36.227.000	29,20%
75	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.450.692.751	652.580.971	44,98%
<b>Total</b>		<b>26.390.239.709</b>	<b>10.411.084.355</b>	<b>39,45%</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2

urusan, 9 program, dan 24 kegiatan dan 75 sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah sebesar Rp 26.390.239.709. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 10.411.084.355. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 15.979.155.354.

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI				PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 TW II	2025	2026
<b>TUJUAN RENSTRA</b>													
Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	Persentase implemmentasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,56	100	100
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	N/A	62,72	64,58	66,34	68,10	69,87	N/A	70,59	71,80	71,80	68,10	69,87
Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	N/A	90	91	92	93	94	N/A	92,46	100	98,87	93	94

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI				PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 TW II	2025	2026
dalam Pembangunan													
<b>SASARAN RENSTRA</b>													
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	24,65	100	100
	Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,24	51,24	51,27	51,29	51,32	51,34	51,15	51,30	49,78	48,76	51,32	51,34
	Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga	4	50	75	100	155	177	4	60	75	87	155	177
	Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	N/A	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	100
Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	743	701	801	801	801	901	738,3	744,4	833,01	833,01	801	901
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	69,74	70,10	70,40	70,70	71,00	71,30	74,56	76,71	78,75	78,75	71,00	71,30

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan “Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak” dan “Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan“ memiliki 3 indikator kinerja yaitu “Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan”, “Indeks Perlindungan Anak (IPA)” dan “Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan” telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sesuai dengan target.
- b. Adapun Sasaran Renstra Sebagai Berikut :
  - 1) Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga, dengan indikator kinerja :
    - a. Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan sudah mencapai 24,65% dari target 100% yang ditetapkan;

- b. Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang dirilis oleh BPS mendapat nilai 48,76 dan tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 51,29;
  - c. Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan ketahanan keluarga sudah mencapai 87 kelurahan dari target 100 kelurahan;
  - d. Persentase penanganan perempuan korban kekerasan sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.
- 2) Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang dengan indikator kinerja Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT,RW, Posyandu) sudah mencapai target 100%.
  - 3) Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, dengan indikator kinerja Peringkat Kota Layak Anak di triwulan II masih belum ada penilaian tersebut.
  - 4) Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, dengan indikator nilai SAKIP di triwulan II masih belum ada penilaian tersebut.

### **2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya:

1. Belum optimalnya Kapasitas Kelembagaan dalam Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak;
2. Semakin kompleksnya kekerasan yang dihadapi oleh perempuan maupun anak;
3. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga;
4. Belum optimalnya peran Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) yang sudah dibentuk;

5. Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan TTG;
6. Lembaga kemasyarakatan yang ada belum berperan serta secara optimal.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Meningkatkan peran serta perempuan dalam kesetaraan gender pada bidang politik dan ekonomi;
- 2) Melaksanakan penanganan kasus secara terpadu dan terintegrasi dengan berbagai pihak terkait, dan melakukan upaya pencegahan terjadinya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak melalui sosialisasi TPPO dan pembentukan JPPA di setiap kelurahan;
- 3) Melaksanakan program kegiatan untuk percepatan penurunan stunting melalui KIE /promosi kesehatan reproduksi pada Calon pengantin ( Catin);
- 4) Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem yang ada pada masyarakat, DP3A mempunyai tantangan untuk tetap berkomitmen meningkatkan pembinaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi melalui workshop dan pelatihan terhadap kelompok perempuan.
- 5) Mengoptimalkan peran serta lembaga kemasyarakatan yang ada di Kota Semarang.

b. Peluang

- 1) DP3A mempunyai mitra kerja yang aktif dan cukup berpengaruh dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan;
- 2) Mempunyai relawan-relawan tangguh yang tergabung dalam PPT pada setiap kecamatan di Kota Semarang dalam melaksanakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 3) Komitmen dan integritas dari lembaga kemasyarakatan yang ada dalam mendukung program kerja DP3A.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai berikut:

1. Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan;
2. Belum optimalnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak;
3. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak yang didukung dengan penyampaian data dan informasi yang akurat;
4. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO;
5. Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus;
6. Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat Kota Semarang dalam Penggalian Potensi SDA dan Penerapan TTG;
7. Masih Lemahnya Jejaring Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
8. Masih Rendahnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan;
9. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKP**

Rancangan Perubahan RKP merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKP, yaitu membandingkan antara

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.8**  
**Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang**

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DP3A Kota Semarang	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	Rp. 14.352.169.630	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DP3A Kota Semarang	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	Rp. 13.291.031.183	
		DP3A Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%			DP3A Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%		
		DP3A Kota Semarang	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%			DP3A Kota Semarang	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%		
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	DP3A Kota Semarang	<i>Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan</i>	<i>27 Dokumen</i>	<i>Rp. 66.202.400</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	DP3A Kota Semarang	<i>Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan</i>	<i>27 Dokumen</i>	<i>Rp. 67.438.600</i>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DP3A Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja)	6 Dokumen	Rp. 31.696.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DP3A Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja)	6 Dokumen	Rp. 32.033.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA Murni	1 Dokumen	Rp. 2.586.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA Murni	1 Dokumen	Rp. 2.586.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	Rp. 3.036.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	Rp. 3.036.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA Murni dan Pergeseran	2 Dokumen	Rp. 1.379.200	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA Murni dan Pergeseran	2 Dokumen	Rp. 1.379.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	Rp. 1.012.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	Rp. 1.012.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Capaian dan Realisasi Kinerja	6 Laporan	Rp. 3.596.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Capaian dan Realisasi Kinerja	6 Laporan	Rp. 4.496.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP3A Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Evaluasi	12 Laporan	Rp. 22.896.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP3A Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Evaluasi	12 Laporan	Rp. 22.896.400	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>DP3A Kota Semarang</b>	<b>Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp.10.274.896.345</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>DP3A Kota Semarang</b>	<b>Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 9.408.991.345</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DP3A Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	Rp. 10.028.308.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DP3A Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	Rp. 9.162.403.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Rp. 242.578.745	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Rp. 242.578.745	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp. 1.124.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp. 1.124.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Rp. 750.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Rp. 750.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Rp. 1.573.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Rp. 1.573.600	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp. 562.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp. 562.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>DP3A Kota Semarang</b>	<b>Cakupan peningkatan pelayanan sumber daya aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 430.877.416</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>DP3A Kota Semarang</b>	<b>Cakupan peningkatan pelayanan sumber daya aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 365.210.046</b>	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Rp. 180.877.416	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Rp. 230.955.596	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	Rp. 250.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	Rp. 134.254.450	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>DP3A Kota Semarang</b>	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi umum</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 1.132.653.027</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>DP3A Kota Semarang</b>	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi umum</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 957.165.639</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DP3A Kota Semarang	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	Rp. 5.355.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DP3A Kota Semarang	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	Rp. 5.355.300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp. 52.384.560	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp. 22.744.560	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Rp. 29.997.620	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Rp. 29.997.620	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp. 64.466.452	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp. 59.365.502	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Rp. 25.375.425	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Rp. 25.375.425	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp. 48.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp. 48.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Rp. 522.468.040	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Rp. 481.340.922	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	Rp. 384.605.630	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	Rp. 284.986.310	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>DP3A Kota Semarang</b>	<b>Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 1.059.191.840</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>DP3A Kota Semarang</b>	<b>Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 1.151.408.449</b>	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	Rp. 418.460.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	Rp. 418.460.000	
	Pengadaan Mebel	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Rp. 398.683.990	Pengadaan Mebel	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Rp. 377.877.930	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp. 184.129.330	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp. 200.907.700	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp. 57.918.520	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp. 64.024.080	

NO	Rancangan Perubahan RPKD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DP3A Kota Semarang</b>	<b>Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 584.758.230</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DP3A Kota Semarang</b>	<b>Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 539.621.812</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Rp. 180.033.090	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Rp. 159.024.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 404.725.140	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 380.597.812	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DP3A Kota Semarang</b>	<b>Persentase pemeliharaan aset dinas</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 803.590.372</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DP3A Kota Semarang</b>	<b>Persentase pemeliharaan aset dinas</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 801.195.292</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp. 39.910.050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp. 39.910.050	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Rp. 401.088.510	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Rp. 373.466.160	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Rp. 43.390.566	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Rp. 43.390.566	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp. 299.562.705	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp. 329.835.425	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	DP3A Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	2 Unit	Rp. 19.638.541	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	2 Unit	Rp. 14.593.091	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 1.528.449.604</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 1.493.250.884</b>	
	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kota Semarang</i>	<i>Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender</i>	<i>96 Program</i>	<i>Rp. 216.903.968</i>	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kota Semarang</i>	<i>Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender</i>	<i>96 Program</i>	<i>Rp. 172.297.248</i>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 33.766.450	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 33.766.450	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender(PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 54.244.530	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender(PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 32.197.810	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	Rp. 70.029.658	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender	4 Perangkat Daerah	Rp. 70.029.658	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten /Kota	46 Perangkat Daerah	Rp. 58.863.330	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan PelaksanaanPengaruhstamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten /Kota	46 Perangkat Daerah	Rp. 36.303.330	
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan partisipasi perempuan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 464.347.212</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan partisipasi perempuan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 499.347.212</b>	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Dokumen	Rp. 83.278.642	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Dokumen	Rp. 118.278.642	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Semarang	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Organisasi	Rp. 381.068.570	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Semarang	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Organisasi	Rp. 381.068.570	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan</b>	<b>31 Lembaga</b>	<b>Rp. 847.198.424</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan</b>	<b>31 Lembaga</b>	<b>Rp. 821.606.424</b>	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	Rp. 527.198.578	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	Rp. 527.198.578	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 Orang	Rp. 160.539.028	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 Orang	Rp. 159.789.028	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Dokumen	Rp. 159.460.818	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Dokumen	Rp. 134.618.818	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</b>	<b>12,84 Poin</b>	<b>Rp. 2.861.551.594</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</b>	<b>12,84 Poin</b>	<b>Rp. 2.709.814.502</b>	
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>Rp. 709.999.882</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>Rp. 828.376.512</b>	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
						<b>Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Rp. 471.254.782	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Rp. 590.371.412	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Perangkat Daerah	Rp. 238.745.100,	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Perangkat Daerah	Rp. 238.005.100	
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan</b>	<b>5 Lembaga</b>	<b>Rp. 1.360.848.184</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan</b>	<b>5 Lembaga</b>	<b>Rp. 1.345.591.625</b>	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	Rp. 1.360.848.184	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	Rp. 1.207.071.625	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi	80 Layanan	Rp. 138.520.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi	80 Layanan	Rp. 138.520.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan</b>	<b>26 Lembaga</b>	<b>Rp. 790.703.528</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan</b>	<b>26 Lembaga</b>	<b>Rp. 535.846.365</b>	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp. 313.882.570	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp. 223.704.590	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	297 Orang	Rp. 130.105.119	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	297 Orang	Rp. 57.480.475	
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 Orang	Rp. 176.828.359	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 Orang	Rp. 88.673.820	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia	19 Dokumen	Rp. 169.887.480	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia	19 Dokumen	Rp. 165.987.480	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kewenangan Kabupaten/Kota		Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 2.581.500.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 2.541.698.720</b>	
	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kota Semarang</i>	<i>Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga</i>	<i>2 Kegiatan</i>	<i>Rp. 2.082.612.120</i>	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kota Semarang</i>	<i>Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga</i>	<i>2 Kegiatan</i>	<i>Rp. 2.048.291.580</i>	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	Rp. 355.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	Rp. 331.482.260	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Dokumen	Rp. 101.500.000	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Dokumen	Rp. 90.697.200	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 1.626.112.120	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 1.626.112.120	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>17 Kegiatan</b>	<b>Rp. 470.551.180</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>17 Kegiatan</b>	<b>Rp. 470.551.180</b>	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Kesejahteraan Keluarga</b>			<b>Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Kesejahteraan Keluarga</b>			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasidan Pendampingan	3 Lembaga	Rp. 73.217.800	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasidan Pendampingan	3 Lembaga	Rp. 73.217.800	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	Rp. 373.887.880	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	Rp. 373.887.880	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 23.445.500	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 23.445.500	
	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 28.336.700</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 22.855.960</b>	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	Rp. 28.336.700	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	Rp. 22.855.960	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 335.219.990</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak</b>	<b>100 %</b>	<b>Rp. 246.319.980</b>	
	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kota Semarang</i>	<i>Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak</i>	<i>2 Kegiatan</i>	<i>Rp. 335.219.990</i>	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kota Semarang</i>	<i>Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak</i>	<i>2 Kegeiatan</i>	<i>Rp. 246.319.980</i>	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	Rp. 99.118.300,	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	Rp. 84.439.140	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Rp. 236.101.690	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Rp. 161.880.840	
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Cakupan Pemenuhan Hak Anak</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 1.832.108.926</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Cakupan Pemenuhan Hak Anak</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 1.667.108.926</b>	
	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kota Semarang</i>	<i>Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA</i>	<i>9 Jejaring</i>	<i>Rp. 449.802.500</i>	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha</i>	<i>Kota Semarang</i>	<i>Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA</i>	<i>9 Jejaring</i>	<i>Rp. 390.185.096</i>	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
						<b>Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3 Organisasi	Rp. 65.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3 Organisasi	Rp. 43.100.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Rp. 384.802.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Rp. 347.085.096	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal</b>	<b>9 Lembaga</b>	<b>Rp. 1.382.306.426</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal</b>	<b>9 Lembaga</b>	<b>Rp. 1.276.923.830</b>	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Rp. 770.790.426	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Rp. 775.324.590	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Rp. 170.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Rp. 153.580.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Rp. 221.516.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Rp. 164.806.530	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Rp. 220.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Rp. 183.212.710	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase anak korban kekerasan yang ditangani</b>	<b>0,01%</b>	<b>Rp. 173.359.216</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase anak korban kekerasan yang ditangani</b>	<b>0,01%</b>	<b>Rp. 173.359.216</b>	
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>Rp. 54.250.000</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>Rp. 54.250.000</b>	
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Semarang	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	100 Orang	Rp. 54.250.000	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Semarang	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	100 Orang	Rp. 54.250.000	
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah lembaga pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>	<b>7 Lembaga</b>	<b>Rp. 96.960.000</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah lembaga pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>	<b>7 Lembaga</b>	<b>Rp. 96.960.000</b>	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
						<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>					
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Semarang	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	60 Orang	Rp. 96.960.000	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Semarang	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	60 Orang	Rp. 96.960.000	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Cakupan lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 22.149.216</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Cakupan lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 22.149.216</b>	
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	60 Orang	Rp. 22.149.216	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	60 Orang	Rp. 22.149.216	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>					
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Presentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 545.129.154</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Presentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 729.977.134</b>	
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan</b>	<b>177 Kelurahan</b>	<b>Rp. 545.129.154</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan</b>	<b>177 Kelurahan</b>	<b>Rp. 729.977.134</b>	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	Rp. 27.463.700	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	Rp. 85.402.700	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa	1 Dokumen	Rp. 517.665.454	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa	1 Dokumen	Rp. 644.574.434,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			serta Lomba Desa dan Kelurahan					serta Lomba Desa dan Kelurahan			
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 1.373.856.361</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 1.825.920.151</b>	
	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<b>Kota Semarang</b>	<i>Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan</i>	<b>177 Kelurahan</b>	<b>Rp. 1.373.856.361</b>	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<b>Kota Semarang</b>	<i>Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan</i>	<b>177 Kelurahan</b>	<b>Rp. 345.985.560</b>	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<b>Kota Semarang</b>	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<b>2 Dokumen</b>	<b>Rp. 388.427.510</b>	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<b>Kota Semarang</b>	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<b>2 Dokumen</b>	<b>Rp. 345.985.560</b>	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,	<b>Kota Semarang</b>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,	<b>1 Lembaga</b>	<b>Rp. 100.667.580</b>	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga	<b>Kota Semarang</b>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,	<b>1 Lembaga</b>	<b>Rp. 100.667.580</b>	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Rp. 124.068.520	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Rp. 130.390.520	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 Laporan	Rp. 760.692.751	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 Laporan	Rp. 1.248.876.491	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2024

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA SEMARANG**

**3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”** yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu **“Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”**. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah **“Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan **ekonomi** yang berkualitas dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan **pengangguran** dan **kemiskinan** serta penghapusan **kemiskinan ekstrem**;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas **Sumber Daya Manusia** yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan **infrastruktur** untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan **tata kelola pemerintahan** yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

**1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan,** dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
- b. Peningkatan nilai investasi;
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
- d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:

- a. Melaksanakan operasi pasar murah;
- b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
- c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
- d. Gerakan menanam;
- e. Merealisasikan BTT;
- f. Dukungan transportasi dari APBD;
- g. Rapat teknis TPID;
- h. Pemantauan harga dan stok;
- i. Menjaga pasokan;
- j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
- k. Bantuan sosial.

**2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem**, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
- f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:

- 1) Administrasi kependudukan;
- 2) Bantuan sembako;
- 3) Jaminan kesehatan;
- 4) Penanganan stunting & gizi buruk;
- 5) Alat bantu penyandang disabilitas;
- 6) Pelayanan pendidikan;
- 7) Rehab rumah tidak layak huni;
- 8) Sanitasi permukiman;
- 9) Sumber air bersih;
- 10) Pelayanan ketenagakerjaan;
- 11) Pemberdayaan UMKM;
- 12) Pelayanan keluarga berencana;
- 13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

**3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif**, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*;
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:

1) Sensitif

- Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
- Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
- Penanganan Kawasan Kumuh;
- Pemberdayaan Ekonomi.

2) Spesifik

- Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
- PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
- PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

**4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota**, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
- f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:

- 1) Tanggul Tambaklorok;
- 2) Sungai Plumbon;
- 3) Sungai Penggaron.

**5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota**, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas 5:

- 1) *Smart City*;
- 2) Penguatan Inovasi;
- 3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG**

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

**“Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak”**

**Dan**

**“Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan”**

dengan indikator tujuan sebagai berikut :

1. Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
2. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
3. Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga;
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang.

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
2. Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan;
3. Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga;
4. Persentase penanganan perempuan korban kekerasan;
5. Peringkat Kota Layak Anak (KLA);
6. Nilai SAKIP;
7. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu).

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3. 1**  
**Target Indikator Tujuan dan Sasaran**  
**Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang**  
**Tahun 2024**

<b>TUJUAN / SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>TUJUAN</b>			
Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	Persentase implemmentasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	%	100
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	66,34
Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	92
<b>SASARAN</b>			
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	%	100
	Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	%	51,29
	Jumlah Kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga	Kelurahan	100
	Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan	%	100
Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	Point	801
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Point	70,70
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	%	100

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2024*

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA**  
**SEMARANG**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Pembangunan Gender (IPG)” dan indikator sasaran “Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						25.409.985.259		24.678.480.696		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						23.490.999.744		22.122.583.411		
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	100%	100%	14,324,076,794	14.352.169.630	14.236.424.080	13.291.031.183		
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%	100%	100%						
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%						
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	160.197.400	66.202.400	66.202.400	67.438.600	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja)	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	125.691.000	31.696.000	31.696.000	32.033.000	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Murni	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.586.000	2.586.000	2.586.000	2.586.000	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.036.000	3.036.000	3.036.000	3.036.000	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Murni dan Pergeseran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.379.200	1.379.200	1.379.200	1.379.200	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian dan Realisasi Kinerja	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	3.596.800	3.596.800	3.596.800	4.496.000	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	22.896.400	22.896.400	22.896.400	22.896.400	PAD	DP3A Kota Semarang
<b>2.08.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>9.918.108.345</b>	<b>10.274.896.345</b>	<b>10.274.896.345</b>	<b>9.408.991.345</b>	<b>PAD &amp; DAU</b>	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/ Bulan	41 Orang/ Bulan	41 Orang/ Bulan	9.671.520.000	10.028.308.000	10.028.308.000	9.162.403.000	PAD & DAU	DP3A Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	242.578.745	242.578.745	242.578.745	242.578.745	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	750.000	750.000	750.000	750.000	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	1.573.600	1.573.600	1.573.600	1.573.600	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	562.000	562.000	562.000	562.000	PAD	DP3A Kota Semarang
<b>2.08.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>382.600.000</b>	<b>430.877.416</b>	<b>315.131.866</b>	<b>365.210.046</b>	<b>PAD</b>	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	132.600.000	180.877.416	180.877.416	230.955.596	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang	400 Orang	400 Orang	250.000.000	250.000.000	134.254.450	134.254.450	PAD	DP3A Kota Semarang
<b>2.08.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.134.598.847</b>	<b>1.132.653.027</b>	<b>1.132.653.027</b>	<b>957.165.639</b>	<b>PAD</b>	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.355.300	5.355.300	5.355.300	5.355.300	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	57.905.370	52.384.560	52.384.560	22.744.560	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	29.997.620	29.997.620	29.997.620	29.997.620	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	64.466.452	64.466.452	64.466.452	59.365.502	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	20.175.425	25.375.425	25.375.425	25.375.425	PAD	DP3A Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	523.546.200	522.468.040	522.468.040	481.340.922	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	385.152.480	384.605.630	384.605.630	284.986.310	PAD	DP3A Kota Semarang
<b>2.08.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.341.628.410</b>	<b>1.059.191.840</b>	<b>1.059.191.840</b>	<b>1.151.408.449</b>	<b>PAD</b>	
2.08.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	933.780.000	418.460.000	418.460.000	508.598.739		
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	281.861.380	418.460.000	398.683.990	377.877.930	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	112.361.790	398.683.990	184.129.330	200.907.700	PAD	DP3A Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	13.625.240	184.129.330	57.918.520	64.024.080	PAD	DP3A Kota Semarang
<b>2.08.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>582.109.140</b>	<b>584.758.230</b>	<b>584.758.230</b>	<b>539.621.812</b>	<b>PAD</b>	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	177.384.000	180.033.090	180.033.090	159.024.000	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	404.725.140	404.725.140	404.725.140	380.597.812	PAD	DP3A Kota Semarang
<b>2.08.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan aset dinas</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>804.834.652</b>	<b>803.590.372</b>	<b>803.590.372</b>	<b>801.195.292</b>	<b>PAD</b>	
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.910.050	39.910.050	39.910.050	Rp. 39.910.050	PAD	DP3A Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	27 Unit	442.264.410	401.088.510	401.088.510	373.466.160	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	43.390.566	43.390.566	43.390.566	43.390.566	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	243.102.165	299.562.705	299.562.705	329.835.425	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	36.167.461	19.638.541	19.638.541	14.593.091	PAD	DP3A Kota Semarang
<b>2.08.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.488.449.604</b>	<b>1.528.449.604</b>	<b>1.528.449.604</b>	<b>1.493.250.884</b>	<b>PAD</b>	
<b>2.08.02.2.01</b>	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender</b>	<b>93 Program</b>	<b>93 Program</b>	<b>93 Program</b>	<b>216.903.968</b>	<b>216.903.968</b>	<b>216.903.968</b>	<b>172.297.248</b>	<b>PAD</b>	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	33.766.450	33.766.450	33.766.450	3.766.450	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender(PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	54.244.530	54.244.530	54.244.530	32.197.810	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	70.029.658	70.029.658	70.029.658	70.029.658	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan PelaksanaanPengaruhustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten /Kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	58.863.330	58.863.330	58.863.330	36.303.330	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.02.2.02	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah organisasi yang mendapat peningkatan partisipasi perempuan</b>	100%	100%	100%	444.347.212	464.347.212	464.347.212	499.347.212	PAD	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	63.278.642	83.278.642	83.278.642	118.278.642	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	25 Organisasi	25 Organisasi	25 Organisasi	381.068.570	381.068.570	381.068.570	381.068.570	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan</b>	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	827.198.424	847.198.424	847.198.424	821.606.424	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	527.198.578	527.198.578	527.198.578	527.198.578	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	50 Orang	50 Orang	160.539.028	160.539.028	160.539.028	159.789.028	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	139.460.818	159.460.818	159.460.818	134.618.818	PAD	Kota Semarang
<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</b>	<b>14,00 Poin</b>	<b>14,00 Poin</b>	<b>14,00 Poin</b>	<b>2.547.556.594</b>	<b>2.861.551.594</b>	<b>3.094.192.378</b>	<b>2.709.814.502</b>	<b>PAD</b>	
<b>2.08.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>549.999.882</b>	<b>709.999.882</b>	<b>757.249.882</b>	<b>828.376.512</b>	<b>PAD</b>	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	411.254.782	471.254.782	518.504.782	590.371.412	PAD	Kota Semarang
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	138.745.100	238.745.100	238.745.100	238.005.100	PAD	Kota Semarang
<b>2.08.03.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan</b>	<b>5 Lembaga</b>	<b>5 Lembaga</b>	<b>5 Lembaga</b>	<b>1.266.853.184</b>	<b>1.360.848.184</b>	<b>1.499.368.184</b>	<b>1.345.591.625</b>	<b>PAD</b>	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	1.266.853.184	1.360.848.184	1.360.848.184	1.207.071.625	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.03.2.02.02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota</i>	-	-	-	-	-	138.520.000	Rp. 138.520.000		
<b>2.08.03.2.03</b>	<b><i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b><i>Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan</i></b>	<b>26 Lembaga</b>	<b>26 Lembaga</b>	<b>26 Lembaga</b>	<b>730.703.528</b>	<b>790.703.528</b>	<b>837.574.312</b>	<b>535.846.365</b>	<b>PAD</b>	
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	253.882.570	313.882.570	313.882.570	223.704.590	PAD	Kota Semarang
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1.630 Orang	1.630 Orang	1.630 Orang	130.105.119	130.105.119	176.975.903	57.480.475	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	3 Orang	3 Orang	3 Orang	176.828.359	176.828.359	176.828.359	88.673.820	PAD	Kota Semarang
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	169.887.480	169.887.480	169.887.480	165.987.480	PAD	Kota Semarang
<b>2.08.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.561.500.000</b>	<b>2.581.500.000</b>	<b>2.581.500.000</b>	<b>2.541.698.720</b>	<b>PAD</b>	
<b>2.08.04.2.01</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>2.062.612.120</b>	<b>2.082.612.120</b>	<b>2.082.612.120</b>	<b>2.048.291.580</b>	<b>PAD</b>	
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	355.000.000	355.000.000	355.000.000	331.482.260	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	81.500.000	101.500.000	101.500.000	90.697.200	PAD	Kota Semarang
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.626.112.120	1.626.112.120	1.626.112.120	1.626.112.120	PAD	Kota Semarang
<b>2.08.04.2.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>17 Kegiatan</b>	<b>17 Kegiatan</b>	<b>17 Kegiatan</b>	<b>470.551.180</b>	<b>470.551.180</b>	<b>470.551.180</b>	<b>470.551.180</b>	<b>PAD</b>	
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasidan Pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	73.217.800	73.217.800	73.217.800	73.217.800	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	150 Orang	373.887.880	373.887.880	373.887.880	373.887.880	PAD	Kota Semarang
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	23.445.500	23.445.500	23.445.500	23.445.500	PAD	Kota Semarang
<b>2.08.04.2.03</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>28.336.700</b>	<b>28.336.700</b>	<b>28.336.700</b>	<b>22.855.960</b>	<b>PAD</b>	
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	28.336.700	28.336.700	28.336.700	22.855.960	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak</b>	100%	100%	100%	278.511.810	335.219.990	335.219.990	246.319.980	PAD	
2.08.05.2.01	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak</i>	<i>2 Kegiatan</i>	<i>2 Kegiatan</i>	<i>2 Kegiatan</i>	278.511.810	335.219.990	335.219.990	246.319.980	PAD	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	99.118.300	99.118.300	99.118.300	84.439.140	PAD	Kota Semarang
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	179.393.510	236.101.690	236.101.690	161.880.840	PAD	Kota Semarang
2.08.06	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Cakupan Pemenuhan Hak Anak</b>	100%	100%	100%	1.794.116.942	1.832.108.926	1.832.108.926	1.667.108.926	PAD	
2.08.06.2.01	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA</i>	<i>8 Jejaring</i>	<i>8 Jejaring</i>	<i>8 Jejaring</i>	395.000.000	449.802.500	449.802.500	390.185.096	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	7 Organisasi	7 Organisasi	7 Organisasi	65.000.000	65.000.000	65.000.000	43.100.000	PAD	Kota Semarang
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	330.000.000	384.802.500	384.802.500	347.085.096	PAD	Kota Semarang
<b>2.08.06.2.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal</b>	<b>7 Lembaga</b>	<b>7 Lembaga</b>	<b>7 Lembaga</b>	<b>1.399.116.942</b>	<b>1.382.306.426</b>	<b>1.382.306.426</b>	<b>1.276.923.830</b>	<b>PAD</b>	Kota Semarang
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	400 Orang	400 Orang	841.156.942	770.790.426	770.790.426	775.324.590	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000	170.000.000	170.000.000	153.580.000	PAD	Kota Semarang
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	207.960.000	221.516.000	221.516.000	164.806.530	PAD	Kota Semarang
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000	220.000.000	220.000.000	183.212.710	PAD	Kota Semarang
<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase anak korban kekerasan yang ditangani</b>	<b>0,012%</b>	<b>0,012%</b>	<b>0,012%</b>	-	-	<b>173.359.216</b>	<b>173.359.216</b>	<b>PAD</b>	
<b>2.08.07.2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>4 Kegiatan</b>	-	-	<b>54.250.000</b>	<b>54.250.000</b>	<b>PAD</b>	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.07.2.01.04	Advokasi dan Pendamping Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan / program / kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan pencegahan KTA	-	-	-	-	-	54.250.000	Rp. 54.250.000	PAD	Kota Semarang
<b>2.08.07.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lembaga pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>	<b>7 Lembaga</b>	<b>7 Lembaga</b>	<b>7 Lembaga</b>	-	-	<b>96.960.000</b>	<b>96.960.000</b>	<b>PAD</b>	
2.08.07.2.02.06	Koordinasi pelaksanaan layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	-	-	-	-	-	96.960.000	96.960.000	PAD	Kota Semarang
<b>2.08.07.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan lembaga penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	<b>22.149.216</b>	<b>22.149.216</b>	<b>PAD</b>	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.07.2.03.06	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	-	-	-	-	22.149.216	22.149.216	PAD	Kota Semarang
<b>2.13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>					<b>1.858.985.515</b>	<b>1.918.985.515</b>		<b>2.555.897.285</b>	<b>PAD &amp; BANKEU</b>	
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Presentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>545.129.154</b>	<b>545.129.154</b>	<b>545.129.154</b>	<b>729.977.134</b>	<b>PAD</b>	
<b>2.13.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan</b>	<b>100 Kelurahan</b>	<b>100 Kelurahan</b>	<b>100 Kelurahan</b>	<b>545.129.154</b>	<b>545.129.154</b>	<b>545.129.154</b>	<b>729.977.134</b>	<b>PAD</b>	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	27.463.700	27.463.700	27.463.700	85.402.700	PAD	Kota Semarang
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	517.665.454	517.665.454	517.665.454	644.574.434	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan</b>	100%	100%	100%	1.313.856.361	1.373.856.361	2.063.856.361	1.825.920.151	PAD & BANKEU	
2.13.05.2.01	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan</i>	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	1.313.856.361	1.373.856.361	2.063.856.361	1.825.920.151	PAD	
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	348.427.510	388.427.510	388.427.510	345.985.560	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100.667.580	100.667.580	100.667.580	100.667.580	PAD	Kota Semarang
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	104.068.520	124.068.520	124.068.520	130.390.520	PAD	Kota Semarang
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	760.692.751	760.692.751	1.450.692.751	1.248.876.491	PAD & BANKEU	Kota Semarang

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2024

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### **a. Catatan Penting**

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

**b. Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

**c. Rencana Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

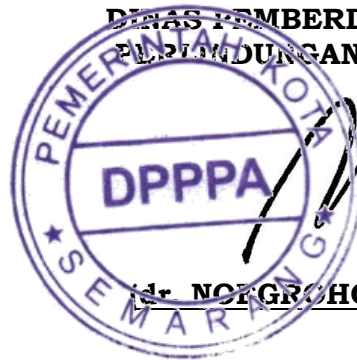
Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

Semarang, 7 Agustus 2024

**Plt. KEPALA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG**



**(Dr. NONGROHO EDY RIJANTO, M.Kes.)**